



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 13 Maret 2024
Waktu	: 13.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M. 2. Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M 3. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariyaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 40 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 11 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Para Wakil Ketua H. Abdul Wachid dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

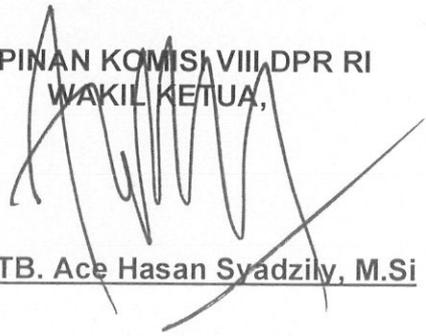
Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas “**Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dan Isu-Isu Aktual**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan penjelasan, bahwa Kementerian Agama RI belum menerima hasil pemeriksaan BPK RI mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M, oleh karena itu bila hasil pemeriksaan tersebut sudah diterima, agar segera disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI
2. Terkait dengan kebijakan perubahan komposisi jumlah jemaah haji reguler dan haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, yang berbeda dengan kesimpulan rapat kerja antara Menteri Agama RI dan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 27 November 2023 mengenai penetapan BPIH Tahun 1445 H/2024 M, dan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445 H /2024 M yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti catatan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI atas persiapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1445 H/2024 M sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan syarikah penyedia layanan di ARMUZNA untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendukung layanan terhadap jemaah haji Indonesia.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI agar Kementerian Agama RI dapat mengakses secara mudah dokumen *Istitho'ah* kesehatan untuk memaksimalkan pemberian layanan kepada jemaah haji masih belum terintegrasi

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,


DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si